

MULTIKULTURALISME PESERTA DIDIK MUSLIM DI YOGYAKARTA *MULTICULTURALISM MUSLIMS STUDENT IN YOGYAKARTA*

A. M. Wibowo

Balai Litbang Agama Semarang

Jl. Untung Suropati Kav 69-70 Bambankerep, Ngaliyan Semarang

email: attara.wibowo@gmail.com

Naskah Diterima: 13 Maret 2018; Direvisi: 5 April 2018; Disetujui: 29 April 2018

Abstract

This study attempts to measure the multiculturalism of Muslim student in high school level in Special region of Yogyakarta as the impact of the implementation of Islamic religious education in the School. Multiculturalism measured includes multiculturalism of Muslim students in high school (SMA), vocational (SMK) and Madrasah Aliyah (MA) education units in urban and rural areas. The focus of this research was conducted in Yogyakarta City and Kulonprogo Regency of Yogyakarta Special Region with Working Hypothesis (H1) (1) there is difference of multiculturalism of Muslim students between high school students, SMK, MA between urban and rural, (2) there is difference of multiculturalism of Muslims Student SMA, SMK, MA is seen from urban and rural, (3) there is interaction between the type of school and school location (rural or urban). By using quantitative research method with two way analysis tool of anova, this research has found 3 findings that are (1) there is difference of multiculturalism of Muslim students between SMA, SMK and MA students, (2) there is difference of multiculturalism level between school in urban and rural areas, where Muslim student in rural schools are more multicultural than students who attend school in urban areas, (3) there is no interaction between the type of education and the area of multicultural education.

Keywords: *Different test; Interaction; MA; Multiculturalism; Muslims student; Rural and urban; SMA; SMK*

Abstrak

Penelitian ini mencoba mengukur multikulturalisme peserta didik muslim pada satuan pendidikan setingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dampak dari implementasi pendidikan agama Islam di Sekolah. Multikulturalisme yang diukur mencakup uji beda multikulturalisme peserta didik muslim pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di perkotaan maupun di pedesaan. Lokus penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Hipotesa kerja (H1) (1) terdapat perbedaan multikulturalisme peserta didik muslim antara peserta didik SMA, SMK, MA antara di perkotaan dengan di pedesaan, (2) terdapat perbedaan multikulturalisme peserta didik Muslim SMA, SMK, MA dilihat dari perkotaan dan Pedesaan, (3) terdapat interaksi antara jenis sekolah dan letak sekolah (pedesaan atau perkotaan). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat uji analisis two way anova penelitian ini berhasil menemukan 3 temuan yaitu (1) terdapat perbedaan multikulturalisme peserta didik muslim antara peserta didik SMA, SMK dan MA, (2) terdapat perbedaan tingkat multikulturalisme antara sekolah yang berada di perkotaan dan pedesaan, dimana muslim yang bersekolah di pedesaan lebih multikulturalis dibandingkan yang bersekolah di perkotaan, (3) tidak terdapat interaksi antara jenis pendidikan dan wilayah terhadap pendidikan multikultural.

Kata kunci: *Interaksi; MA; multikulturalisme; peserta didik; pedesaan dan perkotaan; SMA; SMK; uji beda*

PENDAHULUAN

Persoalan multikulturalisme dan toleransi di Indonesia saat ini sedang diuji pada bentuk disintegratif bangsa. Beberapa contoh bentuk disintegratif antara lain konflik Dayak dan Madura di Kalimantan¹, Konflik Jawa dan Aceh tahun 1975-2005,² konflik Papua, serta konflik Lampung yang melibatkan suku Bali dan Suku Lampung,³ dan lain sebagainya. Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, konflik-konflik antaretnik dapat diatasi dengan kekuatan militer yang selalu melakukan tindakan represif terhadap benih-benih perpecahan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Namun setelah dibukanya pintu demokrasi pada era kepemimpinan Presiden Habibie tindakan represif oleh militer tidak lagi sesuai untuk mengatasi konflik antar etnis⁴.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wahid Institut pada tahun 2007 menyebutkan saat ini toleransi masyarakat di Indonesia sudah pada taraf "lampu kuning". Artinya, memerlukan perhatian sangat serius serta program-program lebih terarah untuk bisa segera menyelamatkan, sebelum nantinya jatuh ke dalam situasi yang semakin buruk. Jika sampai muncul konflik antarmasyarakat, maka 36,3 persen kesalahan akan ditimpakan kepada tokoh agama, kemudian 35,6 persen kepada pemerintah, 7,4 persen kepada presiden, dan 6 persen kepada polisi.⁵

Sebagaimana diketahui negara Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di

dunia.⁶ Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis negara kesatuan yang berbentuk kepulauan ini. Lebih dari 300 kelompok etnik besar seperti Jawa, Bugis, Makassar, Melayu dan lain sebagainya. Mereka memiliki adat kebiasaan berbeda-beda. Selain negara multikultural terbesar di dunia, negara Indonesia juga merupakan negara paling pluralis. Tercatat beberapa agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu serta berbagai aliran kepercayaan lain.

Keterikatan pada identitas etnik memungkinkan timbulnya gesekan antaretnik yang bisa menghambat proses akulturasi bangsa.⁷ Pembentukan identitas etnis merupakan proses eksplorasi dan komitmen yang diterapkan pada nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan dalam berbagai kehidupan yang utama.⁸ Dari proses tersebut akan dihasilkan empat status identitas etnik yang meliputi *Identify Achievement*, *moratorium*, *foreclosure*, dan *identity diffusion*.⁹ Lebih lanjut Myers mengungkapkan bahwa status identitas etnik seseorang di dalam relasi sosial khususnya relasi etnis akan mempengaruhi bagaimana orang lain merespon individu. Ada dua aspek yang mungkin berlangsung dalam relasi sosial, khususnya relasi etnik, yaitu aspek yang *pleasant aspect* yang meliputi *attraction*, *altruism*, dan aspek *unpleasant aspect* yang meliputi *prejudice* dan *aggression*.¹⁰

Suku, budaya, primordialisme agama, stereotip etnik menjadi potensi konflik yang besar jika tidak dikelola dengan baik. Sikap primordial yang berlebihan yang kemudian lazim disebut etnosentris sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Hal ini dikarenakan setiap anggota masyarakat mayoritas akan mengukur keadaan atau situasi berdasarkan nilai dan norma kelompoknya. Sikap ini

¹Kekerasan Antaretnis Dayak dan Madura Pecah. http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekera_sanantaretnis-dayak-dan-madura-pecah. diakses 20 Maret 2018.

²Wiratmadinata. 2014. *Akar Konflik Internal Aceh*. https://www.kompasiana.com/wiratmadinata/akar-konflik-internal-aceh_54f7c316a33311be208b48c5. diakses Januari 2018.

³Kompleksitas Konflik Lampung. <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/04/08580419/Kompleksitas.Konflik.Lampung>. Diakses Februari 2018.

⁴Wibowo, A.M, 2015. *Pendidikan Multikultural di Pulau Dewata, Sebuah Bunga Rampai Tentang Pendidikan Multikultural pada SMA di Provinsi Bali*, Yogyakarta, CV Arti Bumi Intaran, h. 8

⁵Toleransi Masyarakat Sudah "Lampu Kuning, Rabu, 27 Juni 2007 06:54 "http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=117/hl=id/Toleransi_Masyarakat_Sudah_Lampu_Kuning diakses tanggal 15 Agustus 2016

⁶Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo, h. 45

⁷Sarwono, 2007. *Psikologi Prasangka Orang Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 31

⁸Lerner, Richard.M, 2004. *Hand Book of Adolescent Psychology (second edition)*, Jari erik Nurmi, *Sosial ization And Self Development*, Chapter 4, New York- John Wiley & Sons Inc, h.109

⁹Myers, David G. (1996). *Sosial Psycology*. New York: The MC Graw-Hill Companies Inc, h.387

¹⁰Ibid.

menghambat terjadinya integrasi sosial atau integrasi bangsa. Primordialisme harus diimbangi tenggang rasa dan toleransi. Sikap etnosentris dalam masyarakat majemuk sering diikuti oleh stereotip etnik yaitu pandangan umum suatu kelompok etnis yang menganggap kelompoknya lebih baik daripada etnis lain.¹¹

Kondisi keberagaman/multikultural masyarakat dan budaya, secara positif menggambarkan kekayaan potensi sebuah masyarakat yang bertipe pluralis, multi kultur, namun secara negatif orang merasa tidak nyaman karena tidak saling mengenal budaya orang lain. Terjadinya tidak saling mengenal identitas budaya orang lain, bisa mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan. Prasangka juga diarahkan kepada sebuah kelompok secara keseluruhan, atau kepada seseorang hanya karena itu adalah anggota kelompok tertentu.

Pendidikan agama merupakan media yang strategis dan potensial untuk mengenalkan multikulturalisme di Indonesia selain mata pelajaran yang lain IPS, PKn, Antropologi. Hal ini dikarenakan mata pelajaran pendidikan agama mengenalkan nilai-nilai etika dan kebajikan. Pendidikan agama berwawasan multicultural bukan hanya sekedar *transfer knowledge* tetapi juga *transfer of value*. *Transfer of value* dimaksudkan untuk pewarisan nilai-nilai etis-religius-humanis dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya.

Pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di satuan pendidikan, juga mengajarkan tentang multikultural. Pendidikan agama materi pendidikan agama di satuan pendidikan juga mengungkap tentang perbedaan yang ada diluar agama mereka. Pendidikan agama berwawasan multicultural membentuk peserta didik untuk mengkonstruksi pikiran kritis untuk hidup saling percaya, membangun hidup bersama dalam perbedaan, menghilangkan rasa curiga dengan memelihara saling pengertian, terbuka dalam berfikir atas faham-faham yang berbeda, menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), menghargai pendapat orang lain,

resolusi konflik tanpa kekerasan, bekerja keras demi kemajuan bangsa.¹²

Seluruh elemen sekolah memiliki peran yang cukup sentral. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada peserta didik. Selain guru, kepala sekolah juga mempunyai peranan yang cukup vital dalam pendidikan multikultural dimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya dapat menuntun kedalam suatu kondisi yang sangat menuntut pemahaman kepada perbedaan dan keragaman yang ada. Melalui pendidikan multikultural disekolah, subjek belajar dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi.¹³

Beberapa penelitian tentang pendidikan multikultural mengungkapkan bahwa pendidikan multicultural merupakan hal yang diperlukan untuk keragaman yang ada baik ekonomi, sosial budaya dan juga agama. Penelitian Wibowo dkk (2015) berjudul Pendidikan Multikultural di Pulau Dewata menyebutkan, Pendidikan agama berbasis multikultural akan melahirkan generasi-generasi yang siap bergaul, berinteraksi, bekerjasama, saling isi mengisi, saling harga menghargai, hormat menghormati sesama manusia tanpa harus saling menyakiti atau menganggap salah ajaran agama, budaya orang lain.¹⁴ Dewi Indrapangastuti (2014) dalam Jurnal Pembangunan dan pendidikan volume 2 No. 1, berjudul Praktek dan Problematik Pendidikan Multikultural di SMK menghasilkan temuan pendidikan multikultural diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, memiliki kompetensi yang baik, bersikap dan

¹²Baidhaw, Zakiyudin, 2005. Pendidikan agama berwawasan multikultural, Erlangga, Jakarta, h. 8-10

¹³Banks, James A, 2002. *An introduction to multicultural education*. Boston: Allyn & Bacon.

¹⁴Wibowo, A.M, 2015. *Pendidikan Multikultural di Pulau Dewata, Sebuah Bunga Rampai Tentang Pendidikan Multikultural pada SMA di Provinsi Bali*, Yogyakarta, CV Arti Bumi Intaran.

¹¹Horton, Paul B. & Hunt, Chester. L. 1984. *Sosiologi, Jilid II edisi keenam*. Jakarta: Erlangga, h. 65

menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme dan pluralisme di sekolah dan di luar sekolah.¹⁵

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah terkecil di Indonesia yang memiliki luas 3.185,80 km² dengan 5 kabupaten/kota, dan merupakan terkecil kedua setelah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang memiliki luas 740,29 km². Meskipun kecil, DIY merupakan miniatur Indonesia, bermacam suku bangsa Indonesia dengan perbedaannya tinggal di wilayah tersebut. DIY memiliki lebih kurang 120 perguruan tinggi baik negeri, swasta setingkat Universitas sampai dengan akademi sehingga daerah ini disebut juga dengan Kota Pelajar.¹⁶

Pelajar-pelajar dari berbagai daerah yang menuntut ilmu di DIY pada umumnya tergabung dalam organisasi-organisasi kedaerahan. Salehudin (2013) berhasil menginventarisir organisasi-organisasi pelajar berbasis kedaerahan. Tercatat ada 73 asrama berbasis kedaerahan yang statusnya dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing. Beberapa contoh asrama berbasis kedaerahan antara lain Ikatan Pelajar Papua, Ikatan Pelajar Bugis, Ikatan Pelajar Makassar, Ikatan Pelajar Riau, Ikatan Pelajar Batak, Minangkabau dan lain sebagainya. Bahkan pelajar dari Jawa sendiri juga bergabung dalam ikatan pelajar yang berbau kedaerahan seperti, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Tegal, Serulingmas, Madura.¹⁷

Penelitian ini akan mencoba melihat perbedaan multikulturalisme pelajar muslim di DIY pada kategori pelajar perkotaan maupun pedesaan serta sikap toleransi peserta didik muslim pada SMA, SMK, dan MA sebagai akibat dari implementasi pendidikan agama baik di perkotaan maupun di pedesaan. Secara operasional tujuan penelitian ini diturunkan dalam dua tujuan penelitian yaitu (1) mengukur perbedaan multikulturalisme peserta didik muslim pada lembaga pendidikan setingkat

SLTA (SMA, SMK, dan MA) pada level perkotaan dan pedesaan terhadap level jenis sekolah (SMA, SMK, dan MA). (2) melihat sikap toleransi peserta didik muslim sebagai akibat dari pendidikan multikultural di satuan pendidikan masing-masing (SMA, SMK, MA).

Kerangka Teoritik

Multikulturalisme dapat dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.¹⁸ Multikulturalisme sebagai suatu bentuk pendidikan bertumpu pada keadilan sosial, kesetaraan pendidikan dan suatu dedikasi guna memberikan pengalaman pembelajaran di mana seluruh peserta didik dapat mencapai perkembangan secara optimal.¹⁹ Nieto dalam Noel (2000) mengemukakan karakteristik dasar pendidikan multikultural meliputi; pendidikan anti rasis, pervasive (spektrumnya luas), *social justice* (keadilan sosial), *critical pedagogy* (pedagogi kritis).²⁰

Tujuan pendidikan multikultur menurut Banks adalah 1) untuk membantu individu mendapatkan pemahaman diri yang lebih besar dengan melihat diri dari sudut pandang budaya lain; 2) untuk memberikan peserta didik suatu alternatif budaya dan etnis; 3) untuk menyediakan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan semua peserta didik untuk berfungsi dalam budaya etnis mereka, dalam budaya *mainstream*, dan dalam dan lintas budaya etnis lainnya; serta 4) untuk mengurangi rasa sakit dan diskriminasi bahwa pengalaman anggota dari beberapa kelompok etnis dan ras karena karakteristik unik mereka ras, fisik, dan budaya.²¹

Zamroni mengemukakan beberapa tujuan yang akan dikembangkan pada diri peserta didik dalam proses pendidikan multikultural, yaitu peserta didik memiliki *critical thinking* yang kuat, sehingga bisa mengkaji materi yang

¹⁵Dewi Indrapangastuti. 2014. *Praktek Dan Problematik Pendidikan Multikultural Di SMK. Jurnal pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2614>. <http://dx.doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2614>

¹⁶<https://yogyakarta.bps.go.id/Kata:Kependudukan,pendidikan>. Diakses 20 januari 2018

¹⁷Salehuddin, Ahmad, 2013. *Dilema Asrama daerah dalam membentuk kesadaran multicultural*, laporan penelitian individual Dosen, UIN Sunan Kalijaga, h.20

¹⁸Azra, Azyumardi, 2007. "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia", <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20ayyumard%20azra.htm>

¹⁹Zamroni. 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, h.144

²⁰Noel, Jana. (2000). *Multikultural education*. Connecticut: The McGraw-Hill Companies, h. 300

²¹Banks, James A, 2002. *An introduction to multicultural education*. Boston: Allyn & Bacon, h.1-2

disampaikan secara kritis dan konstruktif, memiliki kesadaran atas sifat curiga atas pihak lain yang dimiliki, dan mengkaji mengapa dan dari mana sifat itu muncul, serta terus mengkaji bagaimana cara menghilangkan sifat curiga tersebut, memahami bahwa setiap ilmu bagaikan sebuah pisau bermata dua, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Semua tergantung pada yang memiliki ilmu tersebut. Selain itu pendidikan multikultural bertujuan mengembangkan peserta didik agar memiliki keterampilan untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan ilmu yang dikuasai, bersifat sebagai *a learning person*, belajar sepanjang hayat masih di kandung badan, memiliki cita-cita untuk menempati posisi sebagaimana ilmu yang dipelajari, dapat memahami keterkaitan apa yang dipelajari dengan kondisi dan persoalan yang dihadapi bangsa.²²

Multikulturalisme sebagaimana definisi-definisi diatas memunculkan konsekuensi logis yaitu menguatnya sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Toleransi dalam *Webster's World Dictionary of American Language* beratisikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan toleransi merupakan sifat bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya).²³ Toleransi ini erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Toleransi sebagai bentuk konsekuensi logis pada masyarakat multikultural adalah kerukunan dalam perbedaan” “kesediaan untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau

ditentang oleh seseorang”.²⁴ Toleransi adalah sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru. Dengan sikap itu ia juga tidak mencoba memberangus ungkapan-ungkapan yang sah keyakinan-keyakinan orang lain tersebut. Sikap semacam ini tidak berarti setuju terhadap keyakinan-keyakinan tersebut. Juga tidak berarti acuh tak acuh terhadap kebenaran dan kebaikan, dan tidak harus didasarkan atas agnostisisme, atau skeptisisme, melainkan lebih pada sikap hormat terhadap pluriformitas dan martabat manusia yang berbeda.²⁵

Dalam konteks multikulturalisme toleransi beragama merupakan kesadaran seseorang untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku, dan praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik.

Kategori Perkotaan dan Pedesaan

Kota dibedakan secara kontras dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. Desa atau kampung didominasi oleh lahan terbuka bukan pemukiman. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 kota merupakan Daerah Otonom, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, bagian dari 2 atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Dalam sudut pandang geografi, kota merupakan suatu daerah yang memiliki wilayah batas administrasi dan bentang lahan luas, penduduk relatif banyak, adanya heterogenitas penduduk, sektor agraris sedikit atau bahkan tidak ada, dan adanya suatu sistem pemerintahan.

Suatu daerah dinamakan kota jika memenuhi syarat seperti heterogenitas penduduk, pusat peradaban, pemerintahan, stratifikasi

²²Zamroni. 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, h.144

²³Poerwodarminta. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, h. 1204

²⁴Mujani, Syaiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.62.

²⁵Lorens, Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 1111-1112

sosial lebih besar, individualis, kontak sosial lebih banyak, mata pencaharian: non agraris heterogen, rumah dengan tempat kerja: jauh – terpisah, kepadatan penduduk: tinggi, dan kepadatan rumah tinggi.²⁶ Sedangkan Pengertian desa menurut Undan-Undang No. 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Masyarakat desa memiliki ciri-ciri seperti kehidupan tergantung pada alam, toleransi sosialnya kuat, adat-istiadat dan norma agama kuat, kontrol sosialnya didasarkan pada hukum informal, hubungan kekerabatan didasarkan pada *Gemeinschaft* (paguyuban), pola pikirnya irrasional, struktur perekonomian penduduk bersifat agraris.²⁷

Terkait dengan lokus penelitian di kota DIY dan Kabupaten Kulonprogo, untuk menentukan apakah wilayah di DIY termasuk dalam kategori perkotaan atau pedesaan, dipergunakan buku peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37 tahun 2010 tentang klasifikasi perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Daerah perkotaan, adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.²⁸

METODE PENELITIAN

Hipotesis kerja penelitian ini adalah

H1: terdapat perbedaan multikulturalisme antara peserta didik SMA, SMK, MA di perkotaan dengan peserta didik SMA, SMK, dan MA di pedesaan.

H1: terdapat perbedaan multikulturalisme peserta didik dilihat dari jenis sekolahnya.

H1: terdapat interaksi multikulturalisme anatara jenis sekolah dan letak sekolah baik di perkotaan maupun di pedesaan

Dengan membuktikan ada tidaknya perbedaan multikulturalisme antar peserta didik SMA, SMK, MA di perkotaan dan pedesaan penelitian ini sekaligus dapat melihat toleransi peserta didiknya. Hal ini dikarenakan instrument yang digunakan dalam mengukur multikulturalisme di dalamnya mencakup sikap toleransi peserta didik.

Penelitian ini menggunakan *mixed method* perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk memperoleh data tentang uji beda multikulturalisme pada lembaga pendidikan setingkat SMA (SMA, SMK, MA) di Kota Yogyakarta dan kabupaten Kulonprogo. Metode kuantitatif juga dipergunakan untuk mengetahui hubungan klasifikasi Perkotaan dan pedesaan terhadap pendidikan multikultural di SMA (SMK, SMA, MA). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan sikap toleransi peserta didik sebagai akibat dari pendidikan multikultural di satuan pendidikan masing-masing (SMA, SMK, MA).

Populasi penelitian indeks multikultural pada sekolah menengah atas ini adalah seluruh SMA, SMK dan MA di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo baik swasta maupun Negeri. Sampel satuan pendidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu satuan pendidikan yang ada di perkotaan dan pedesaan. pengambilan sampel di tingkat satuan pendidikan digunakan *error sampling* sebesar 10% yang mewakili keterwakilan SMK, SMA, MA dengan menggunakan pengambilan sampel dilakukan secara acak pada SMA-SMA di masing-masing wilayah Kota/kabupaten di DIY. Penentuan jumlah sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, dan e adalah error (tingkat kesalahan).

Pengambilan peserta didik sebagai responden digunakan model *stratified random sampling*, yaitu dengan mengambil peserta didik pada kelas X, XI, dan XII. Pengambilan peserta didik sebagai responden penelitian juga mempertimbangkan agama yang berbeda (untuk sekolah umum), jenis kelamin yang berbeda, dan suku yang berbeda (jika

²⁶Peraturan Kepala Badan Busat Statistik No 37 Tahun 2010. Badan Pusat Statistik, h. 11

²⁷ibid

²⁸ibid

memungkinkan). Berikut data populasi dan sampel penelitian.

Tabel 1. Proporsi sampel berdasarkan perhitungan Slovin

Wilayah	SMA		SMK		MA	
	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
Yogyakarta	42	9	32	5	6	3
KulonProgo	16	4	37	6	4	2
Jumlah	58	13	69	11	10	5

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah multikulturalisme di sekolah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis sekolah yang meliputi SMA, SMK, dan MA. Variabel control dalam penelitian ini adalah wilayah sekolah yang meliputi sekolah di perkotaan dan di pedesaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat macam teknik, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan kuesioner. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang pandangan komponen pendidikan terhadap penerapan pendidikan agama berwawasan multikultural. Observasi digunakan untuk mengamati antara lain pelaksanaan budaya sekolah pendukung multikulturalisme, proses pembelajaran di kelas sebagai bentuk implementasi kurikulum, serta perilaku peserta didik sehari-hari di sekolah.

Kuesioner dipergunakan untuk mengetahui sikap pernyataan peserta didik terhadap contoh-contoh kasus-kasus yang diberikan. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan multikulturalisme dan pluralism dalam kehidupan beragama serta toleransi. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala sikap. Skala sikap yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*.

Instrumen Penelitian ini menggunakan *benchmark* pendidikan multikultural dari teori James Banks dalam melihat multikultural atau tidaknya lembaga pendidikan. *Benchmark* multikultural berpijak pada 5 dimensi multikultural sebagaimana tersebut pada kerangka teoritik meliputi (1) Kebijakan pendidikan yang mendukung keragaman, (2) sikap positif tenaga kependidikan terhadap keberagaman peserta didik, (3) kurikulum yang transformasional dan tindakan terfokus pada konsep keberagaman, (4) strategi pembelajaran yang konstruktivistik menarik, kooperatif dengan mengakomodasi peserta didik yang berbeda agama, etnik, jenis kelamin dan status sosial ,

(5) monitoring terhadap proses pendidikan multikultural oleh pengawas sekolah.²⁹ Kisi-kisi instrument tersebut di atas akan dijabarkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan peserta didik yang terdiri dari item pernyataan *favorable* dan *unfavorable* yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik.

Reliabilitas Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diujicobakan pada beberapa peserta didik SMA. Hasil uji coba dianalisis untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Sebuah *instrument* dinyatakan *reliable* adalah ketika hasil perhitungan reliabelitas diperoleh nilai lebih besar dari 0,883 (Azwar, 2012:80). Uji reliabelitas terhadap 138 responden pada peserta didik SMA, SMK, dan MA. Dengan menggunakan rumus *alfa cronbach* pada perhitungan statistik dengan alat bantu SPSS versi 20 diperoleh nilai *alpha cronbach* pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Dari perhitungan statistik diperoleh nilai *alpha cronbach* sebesar 0,904. Dengan demikian *instrument* penelitian telah memenuhi kriteria reliabel, artinya dapat dipergunakan pada pengambilan data.

Validitas instrument dalam penelitian ini dilakukan dengan model validitas isi (*content validity*) yaitu validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validitas ini adalah sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh alat ukur yang bersangkutan. Dalam validitas isi ini melibatkan beberapa *rater* (penilai) yang dipandang kompeten untuk memberikan penilaian ter-

²⁹Banks, James A. 2002. *An introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn & Bacon, h.131

hadap instrumen. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dicari rata-ratanya.

Untuk melihat valid tidaknya sebuah item pertanyaan dapat dilihat dengan membandingkan hasil perhitungan statistik validitas dengan nilai r tabel. Ketentuan Pengujian Validitas sebuah instrumen apabila angka penghitungan koefisien korelasi pada setiap item kuesioner lebih besar dari angka pembandingan pada Tabel r Kritik *Product*

Tabel 2. Uji reliabilitas instrumen

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	138	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	138	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Moment ($r > r$ tabel), maka item kuesioner tersebut dapat dinyatakan valid; dan sebaliknya apabila perhitungan koefisien korelasi pada setiap item kuesioner lebih kecil dibandingkan dengan r tabel maka item kuesioner dinyatakan tidak valid. Dengan responden 138 responden ($df-2$) diperoleh nilai r tabel sebesar 0,141. Dari 59 item kuesioner tersebut setelah dilakukan validasi diperoleh 56 item kuesioner yang valid.

Tabel 3. Koefisien *alpha cronbach*

Cronbach's Alpha	N of Items
.904	59

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua model yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dipergunakan untuk mengukur perbedaan multikulturalisme peserta didik antara SMA di perkotaan dan di pedesaan yaitu dengan menggunakan anova dua jalur. Anova dua jalur

dipergunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara wilayah, jenis sekolah dan interaksi antara wilayah dan jenis sekolah baik itu pendidikan multikultural di SMA, SMK, maupun MA penelitian ini menggunakan alat uji anova dua jalur, dengan diagram weiner 2x3 berikut.

Tabel 4. Desain faktorial penelitian pendidikan multikultural pada peserta didik setingkat SMA

		Tingkatan Kelas		
		SMK	SMA	MA
Kategori Sekolah	Perkotaan	A1	A2	A3
	Pedesaan	B1	B2	B3

Keterangan:

A1 = peserta didik SMK Perkotaan

A2 = peserta didik SMA Perkotaan

A3 = peserta didik MA Perkotaan

B1 = peserta didik SMK pedesaan

B2 = peserta didik SMA pedesaan

B3 = peserta didik MA pedesaan

Ada 3 hipotesis nol (H_0) untuk menguji perbedaan pendidikan multikultural pada sekolah setingkat SLTA (SMA, SMK, MA) sebagai berikut.

1. Tidak terdapat perbedaan pendidikan multikultural pada jenis sekolah SMA, SMK, dan MA
2. Tidak terdapat perbedaan multikulturalisme dilihat dari kategori sekolah di perkotaan dan di pedesaan.

3. Tidak terdapat interaksi antara wilayah sekolah di perkotaan dan pedesaan terhadap jenis sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 736 responden yang terdiri dari peserta didik dari SMA, SMK, dan MA di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo baik mewakili perkotaan maupun pedesaan di DIY.

Jika dituangkan dalam diagram sampel peserta didik yang mewakili masing-masing wilayah dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari diagram di atas terlihat bahwa jumlah sampel terbanyak adalah peserta didik SMA disusul SMK dan MA. Hal ini merupakan cerminan dari pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin.

Uji Perbedaan Multikulturalisme di SLTA (SMA, SMK, dan MA)

Uji perbedaan multikulturalisme pelajar muslim setingkat SLTA (SMA, SMK, dan MA) dilakukan dengan analisis *Two Way Anova*. Uji perbedaan multikulturalisme siswa pada sekolah setingkat SLTA (SMA, SMK,

MA) terkait dengan perbedaan siswa yang bersekolah di perkotaan dan sekolah yang berada di pedesaan.

H₁= terdapat perbedaan multikulturalisme pelajar muslim SLTA (SMK, SMA, MA) dengan faktor wilayah yaitu sekolah di perkotaan dan pedesaan. Terdapat tiga hipotesis kerja (H₁) untuk menguji perbedaan multikulturalisme siswa Muslim setingkat SLTA di DIY yaitu: 1) Terdapat perbedaan multikulturalisme antara siswa yang bersekolah di wilayah perkotaan dan di pedesaan; 2) Terdapat perbedaan multikulturalisme antara siswa SMA, SMK, dan MA; 3) Tidak terdapat interaksi multikulturalisme siswa antara wilayah sekolah dan jenis sekolah.

Tabel 2. Uji reliabilitas instrumen

Case processing summary			
		N	%
Cases	Valid	138	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	138	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

Tabel 3. Koefisien alpha cronbach

Cronbach's alpha	N of items
.904	59

Tabel 4. Desain faktorial penelitian pendidikan multikultural pada peserta didik setingkat SMA

		Tingkatan Kelas		
		SMK	SMA	MA
Kategori Sekolah	Perkotaan	A1	A2	A3
	Pedesaan	B1	B2	B3

Keterangan:

A1 = peserta didik SMK Perkotaan

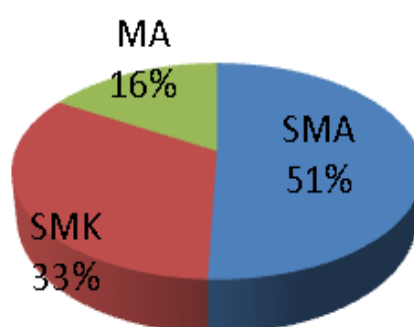
A2 = peserta didik SMA Perkotaan

A3 = peserta didik MA Perkotaan

B1 = peserta didik SMK pedesaan

B2 = peserta didik SMA pedesaan

B3 = peserta didik MA pedesaan



Gambar 1. Komposisi sampel penelitian berdasarkan jenis sekolah

Tabel 5. Tests of between-subjects effects dependent variable: nilai_multikultural

Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected model	104727.877 ^a	5	20945.575	43.892	.000
Intercept	16886511.364	1	16886511.364	35386.140	.000
Wilayah	12378.205	1	12378.205	25.939	.000
jenis_sekolah	61843.747	2	30921.873	64.798	.000
wilayah * jenis_sekolah	984.025	2	492.013	1.031	.357
Error	348361.058	730	477.207		
Total	34146962.000	736			
Corrected total	453088.935	735			

a. R Squared = .231 (Adjusted R Squared = .226)

Dengan menggunakan SPSS versi 20, alat uji anova dua jalur diperoleh hasil perhitungan sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Perhitungan uji anova dua jalur di atas diperoleh hasil perhitungan signifikansi pada variabel wilayah (sekolah di perkotaan dan pedesaan) sebesar 0,000. Nilai signifikansi hasil uji statistik tersebut jika dibandingkan dengan taraf signifikansi alpha 5% (confidence level at 95%) adalah lebih kecil sehingga H_0 ditolak. Maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan multikulturalisme peserta didik SMA dilihat dari wilayah dimana peserta didik muslim bersekolah yaitu di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan demikian Hipotesis Kerja (H1) yang menyatakan terdapat perbedaan multikulturalisme antara peserta didik yang bersekolah di perkotaan maupun di pedesaan diterima. Artinya adalah ada perbedaan tingkat multikulturalisme antara peserta didik yang bersekolah di perkotaan dengan peserta didik yang bersekolah di pedesaan.

Perhitungan anova untuk variabel jenis sekolah (SMK/SMA/MA) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai ini dibandingkan dengan taraf signifikansi alpha 5% (confidence level at 95%) maka nilai signifikansi jenis sekolah lebih kecil dari nilai alpha. Hal ini berarti hipotesis kerja (H1) yang berbunyi terdapat perbedaan multikulturalisme antar jenis sekolah SMA, SMK, MA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan multikulturalisme dilihat dari jenis sekolahnya. Artinya adalah peserta didik yang bersekolah di SMA, SMK, dan MA memiliki tingkat multikultural yang berbeda.

Pada nilai signifikansi interaksi antara wilayah dengan jenis sekolah diperoleh hasil

perhitungan 0,357 jika dibandingkan dengan taraf signifikansi alpha 5% (Confidence level at 95%) maka nilai signifikansi hasil perhitungan lebih besar. Dengan demikian maka H_0 yang berbunyi tidak terdapat interaksi antara wilayah dan jenis sekolah diterima. Artinya antara wilayah sekolah dan jenis sekolah tidak saling mempengaruhi terhadap multikulturalisme.

PEMBAHASAN

Dari hasil temuan di atas peneliti mencoba menganalisis mengapa multikulturalisme yang melahirkan sikap toleransi di daerah pedesaan lebih baik dibandingkan dengan di daerah perkotaan. *Pertama*, jika dilihat monografinya Kota Yogyakarta sebagai pusat-pusat keramaian dan pusat perekonomian memungkinkan mudahnya terjadi gesekan-gesekan baik secara kultur budaya ekonomi. Sedangkan di daerah pedesaan seperti di wilayah Kulonprogo memiliki cenderung memiliki sikap toleransi dikarenakan secara perekonomian dan sosial daerah pedesaan hanya satu kultur saja yaitu kultur agraris.

Kedua, di daerah perkotaan Yogyakarta banyak ditemukan kelompok-kelompok, ikatan atau organisasi yang bersifat kedaerahan yang hidup dan beraktifitas di kota tersebut dibandingkan dengan di Kulonprogo. Tercatat Kota Yogyakarta terdapat 73 asrama bersifat kedaerahan yang aktif mengisi kehidupan perkotaan baik pelajar maupun bekerja. Sedangkan di Kulonprogo tidak ada hal-hal yang seperti di Kota Yogyakarta. Jika dicermati, keberadaan asrama bersifat kedaerahan di Kota Yogyakarta memiliki tujuan yang sama, yaitu selain untuk

memfasilitasi pelajar daerah melanjutkan studinya, juga sebagai representasi kehadiran daerah asal di Yogyakarta dan sebagai representasi daerah dan etnis. Keberadaan asrama daerah juga untuk menjaga eksistensi budaya daerah asal. Hal ini dapat dilihat pada program kerja masing-masing asrama daerah, baik yang bersifat internal, yaitu program kerja yang dipersiapkan secara eksklusif untuk warga asrama daerah, maupun kegiatan yang bersifat eksternal, yaitu kegiatan yang diadakan untuk masyarakat umum.

Sebagian anggota organisasi tersebut lebih senang bergabung, berteman dengan orang yang satu suku daerah dibandingkan dengan yang lain daerah. Bahkan peneliti melihat untuk beberapa asrama yang bersifat kedaerahan cenderung lebih eksklusif. Eksklusifitas sebagaimana peneliti sebutkan di atas memungkinkan sering terjadi gesekan antara etnis dan proses multikultural tidak berjalan dengan baik.

Keberadaan organisasi yang bersifat kedaerahan tersebut idealnya harus lebih terbuka, karena ini merupakan langkah yang strategis tidak saja untuk menyosialisasikan kekayaan tiap-tiap etnis, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran multikultur dikalangan masing-masing etnis yang hadir dan hidup di Yogyakarta. Salah satu caranya adalah dengan cara memperbanyak ruang

bertemu antaretnis, sehingga sikap etnosentrisme dapat di konversi menjadi sikap bangga menjadi bagian dari keragaman budaya Indonesia.

Berbeda dengan di Kota Yogyakarta, di Kab. Kulonprogo cenderung bersifat monokultur yaitu kultur agraris. Pada kultur masyarakat agraris biasanya sifat-sifat gotong royong, setiap warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas-batas wilayahnya karenanya gesekan-gesekan pun jarang terjadi.

Perbedaan wilayah dan jenis sekolah terhadap Pendidikan Multikultural

Dari hasil uji beda pendidikan multikultural pada satuan pendidikan setingkat SLTA (SMA, SMK, MA) di wilayah perkotaan dan pedesaan sebagaimana uji anova di atas terbukti bahwa terdapat perbedaan pendidikan multikultural pada level jenis sekolah, terdapat perbedaan pada tingkat wilayah (perkotaan dan pedesaan), serta tidak terdapat interaksi antara wilayah dan jenis sekolah. Jika dilihat dari deskripsi statistik hasil uji beda terlihat bahwa memang terlihat perbedaan pada nilai *mean*, baik dilihat dari wilayah maupun jenis sekolahnya. Nilai rata-rata jawaban peserta didik tersebut dapat dilihat dari Tabel 6.

Tabel 6. Wilayah * jenis_sekolah dependent variable: nilai_multikultural

Wilayah	jenis_sekolah	Mean	Std. error	95% Confidence interval	
				Lower bound	Upper bound
Perkotaan	SMA	217.307	1.270	214.815	219.800
	SMK	213.768	1.552	210.720	216.815
	MA	188.898	2.207	184.566	193.230
Pedesaan	SMA	232.645	2.506	227.725	237.564
	SMK	225.500	3.293	219.035	231.965
	MA	196.333	4.459	187.579	205.088

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis pendidikan dan wilayah terlihat rata-rata nilai multikultural SMA di perkotaan adalah 217,307 sedangkan SMA di pedesaan adalah 232,645. Meskipun perbedaan itu terlihat kecil namun membuktikan bahwa nilai multikultural peserta didik SMA di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan SMA di perkotaan.

Pada satuan pendidikan SMK di perkotaan diperoleh nilai multikultural sebesar

213,768 sedangkan SMK di pedesaan diperoleh nilai rata-rata 225,500. Ini juga membuktikan bahwa nilai multikulturalitas peserta didik SMK di pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan peserta didik SMK di perkotaan.

Pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah terlihat bahwa nilai multikultural pada MA di perkotaan adalah 188,898 sedangkan MA di pedesaan nilai-rata-rata multikulturalnya

adalah 196, 333 ini juga membuktikan bahwa nilai multikultural peserta didik MA di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik MA di perkotaan.

Jika dibandingkan antara SMA, SMK, dan MA terlihat secara rata-rata nilai multikultural peserta didik SMA lebih tinggi dibandingkan SMK dan MA. Hal ini dapat dimaklumi karena pelajaran di SMA memang banyak berkenaan dengan mata pelajaran umum (teori) sedangkan di SMK lebih banyak pelajaran pelajaran yang bersifat vocational yang berorientasi pada kerja, sehingga lebih banyak pelajaran praktik yang menunjang kecakapan *soft skill*. Pendidikan vokasional merupakan penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Kurikulum dalam pendidikan vokasional, terkonsentrasi pada sistem pembelajaran keahlian (*apprenticeship of learning*) pada kejuruan-kejuruan khusus (*specific trades*). Kelebihan pendidikan vokasional ini, antara lain, peserta didik secara langsung dapat mengembangkan keahliannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau bidang tugas yang akan dihadapinya.

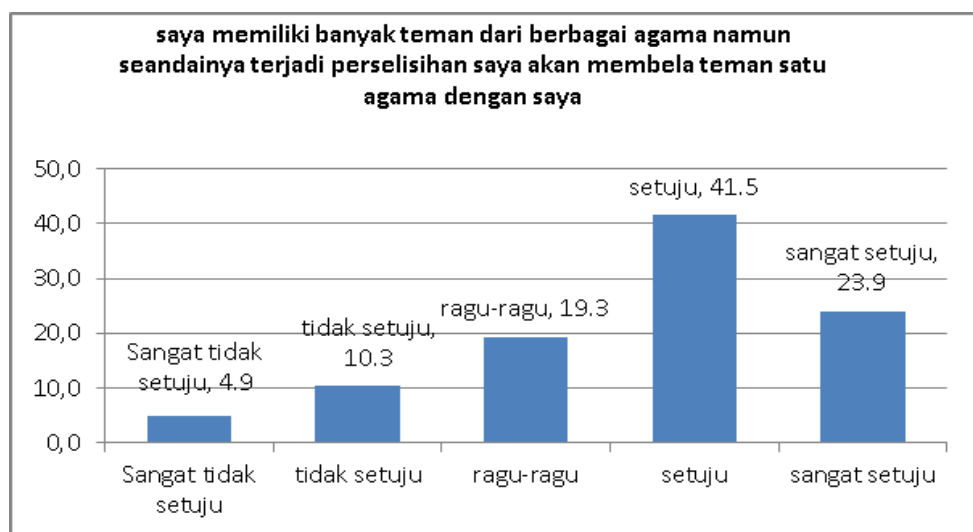
Madrasah Aliyah merupakan adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal yang setara dengan sekolah menengah atas. Namun pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Dilihat dari peserta didiknya bersifat *homogeny* dalam hal pemeluk agamanya. Selain itu secara keseluruhan mata

pelajaran di MA adalah berbasis Agama Islam. Sehingga tidak heran jika multikulturalitasnya lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik SMA maupun SMK meskipun masih tergolong pada kategori yang sama yaitu multikultural.

Multikulturalisme dan Konsekuensi logis toleransi peserta didik SMA

Kuat lemahnya multikulturalisme yang dimiliki peserta didik setingkat SMA melahirkan konsekuensi logis berupa sikap toleransi peserta didik. Hal tersebut dilihat dari variasi jawaban pertanyaan yang diberikan peserta didik kepada peneliti. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan multikulturalisme peserta didik meliputi sifat keagamaan, sikap curiga terhadap bantuan sosial, kekerasan atas nama agama, egoisme, dan pergaulan sesama teman. Adapun uraian tentang sikap multikulturalisme peserta didik dijabarkan sebagai berikut.

Sikap keagamaan peserta didik terkait dengan perselisihan antar teman yang berbeda agama diwakili oleh pertanyaan yakni: (1) pembelaan terhadap teman satu agama jika terjadi perselisihan di antara teman teman, (2) ketidaksetujuan terhadap kekerasan atas nama agama (3) berpegang teguh dengan agama namun tetap menghormati pemeluk agama lain. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase sikap peserta didik dalam konteks perselisihan

Dari diagram tersebut terlihat bahwa sikap toleransi terkait keagamaan berupa apa-

kah ia akan membela teman satu agama jika terjadi perselisihan 66% responden akan mem-

bela teman satu agama, 15% menjawab tidak akan membela dan 19% menjawab ragu-ragu.

Sikap toleransi peserta didik terkait dengan sikap sosial diwakili oleh 2 pertanyaan yakni: (1) curiga atas bantuan sosial atas nama agama di daerah bencana, dan (2) kerjabakti membersihkan tempat ibadah lain. Hasilnya sebanyak 46 % peserta didik yang masih merasa curiga terhadap bantuan sosial di daerah bencana yang dibawa oleh kelompok agama tertentu, 39% ragu-ragu, dan 15% tidak menaruh curiga apabila ada bantuan sosial yang dibawa oleh kelompok agama tertentu. Terkait kegiatan sosial berupa kerjabakti membersihkan tempat ibadah umat lain, sebanyak 40% responden menjawab ragu-ragu, 38% responden menjawab setuju, dan 22% tidak setuju jika harus melakukan kerjabakti membersihkan tempat ibadah umat lain.

Terkait dengan sikap peserta didik yang bermuara pada sikap berpegang teguh pada ajaran agama yang dianut namun tetap menghormati dan menghargai orang yang berlainan agama. Dari 736 responden menjawab sebanyak 96% responden menjawab akan berpegang teguh terhadap ajaran agama yang dianut dan tetap menghormati dan menghargai pemeluk lain, 3 % menjawab ragu dan 1 persen tidak akan menghormati pemeluk lain. Ini artinya mayoritas peserta didik telah memiliki prinsip-prinsip dan nilai multikultural yang kemudian melahirkan sikap toleransi.

Hal ini diperkuat dengan jawaban peserta didik yaitu dari 736 responden, 73 % menyatakan tidak setuju dengan kekerasan yang mengatasnamakan dan khutbah-khutbah atau ceramah yang menjelekkan agama lain. hal ini mungkin saja terjadi karena pemahaman-pemahaman tentang ajaran kasih sayang dan hormat-menghormati terhadap orang lain telah terimplementasi dalam mata pelajaran yang diterima peserta didik. Namun demikian jika suatu saat terjadi kekerasan dan kekerasan tersebut menyentuh pada ranah yang bersifat pribadi seperti agama dan kesukuan, maka peserta didik akan membela kelompoknya sendiri yang terdiri atas suku, bahkan, atas nama agama. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban-jawaban yang diberikan responden terkait persoalan tersebut. Dari 736 responden sebanyak 58 % menjawab bahwa ia lebih senang berteman dengan teman satu suku

dan akan membela teman satu suku jika terjadi perselisihan, dan jika terjadi perselisihan sebanyak 57% responden akan membela teman satu agama.

Pembelaan terhadap sesuatu yang menyentuh ranah pribadi responden seperti kesukuan dan kedaerahan bisa saja dimaklumi sebagai salah bentuk solidaritas. Oleh karena itu sebaiknya pendidikan multikultural yang nantinya akan melahirkan sikap toleransi sebaiknya juga menyentuh pada persoalan inklusifitas dan menyadarkan kita bahwa di luar diri kita masih terdapat budaya, agama, dan suku lain yang harus kita ketahui tentang persoalan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam pergaulan sehari-hari.

Secara umum nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme yang dimiliki peserta didik dimungkinkan sebagai hasil dari pendekatan progresif pendidikan di sekolah dalam menanamkan rasa keadilan sosial di dalam masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan Nieto dalam Noel dalam Zamroni, bahwa sesungguhnya karakteristik dasar pendidikan multikultural adalah merupakan proses pendidikan dasar yang menanamkan anti rasisme dan *sosial justice* (keadilan sosial).³⁰

Nilai toleransi peserta didik sebagaimana data di atas jika dikaitkan dengan perbedaan geografis antara sekolah di perkotaan dan pedesaan juga saling berkaitan dimana toleransi peserta didik di pedesaan lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang bersekolah di perkotaan. Hal tersebut karena heterogenitas sekolah di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan yang di pedesaan.

Jika dikaitkan dengan teori heterogenitas masyarakat perkotaan, terbukti bahwa masyarakat perkotaan cenderung dalam sikap hidup mereka cenderung lebih individualistik dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Dilihat dari tingkah lakunya masyarakat perkotaan lebih kreatif, radikal dan dinamis dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Dan dari sisi perwatakannya masyarakat perkotaan cenderung lebih materialistik dibandingkan dengan masyarakat pedesaan.³¹

³⁰Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Biagraf Publishing, h. 300

³¹Cholil, Mansyur. 1990. *Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota*. Surabaya: Usaha Nasional, h. 107

PENUTUP

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Terdapat perbedaan pendidikan multikultural antara sekolah yang berada dipertanian dan pedesaan, dimana siswa yang bersekolah di pedesaan lebih toleran dibandingkan sekolah di pedesaan. *Kedua*, Terdapat perbedaan pendidikan multikultural dilihat dari jenis sekolah dimana Siswa MA lebih toleran dibandingkan siswa SMK dan MA. *Ketiga*, Tidak terdapat interaksi antara jenis pendidikan dan wilayah terhadap pendidikan multikultural. Artinya jenis sekolah dan wilayah sekolah (pedesaan dan perkotaan tidak saling mempengaruhi atau tidak saling memberikan kontribusi pada hasil toleransi siswa.

Berdasarkan simpulan di atas maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kementerian Agama menyusun modul tentang pendidikan multikultural untuk kepala sekolah dan guru agama baik di madrasah maupun sekolah umum. 2) Kementerian Agama melakukan sosialisasi dalam bentuk workshop pendidikan multikultural dengan mengundang kepala sekolah serta guru agama. 3) Berdasarkan eksklusifitas organisasi kedaerahan yang ada seyogyanya Kementerian Agama bersama sama dengan Kemendikbud dan Dinas Pariwisata membuat *event* pentas seni budaya dengan peserta didik sebagai pesertanya untuk mengenalkan budaya yang ada di Indonesia. 4) Pemerintah perlu memberikan dukungan materiil dan akademis guna meningkatkan kualitas multikultural dengan memperhatikan perbedaan jenis sekolah dan perbedaan geografis. 5) Organisasi yang bersifat kedaerahan agar lebih inklusif dan bergaul dengan masyarakat yang ada disekitar mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah yang telah mau memberikan kesempatan kepada peserta didiknya dalam berpartisipasi menjadi responden penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. 2007. "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme

- Indonesia", <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20ayyumardi%20azra.htm>
- Azwar, Saifudin. 2012. *Reliabilitas dan Validitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baidhaw, Zakiyudin. 2005. Pendidikan agama berwawasan multikultural, Erlangga, Jakarta.
- Banks, James A. & Cherry McGee Banks, (eds). 2001. *Multicultural education issues and perspectives*. New York: John Wiley and Sons.
- Banks, James A. 2002. *An introduction to multicultural education*. Boston: Allyn & Bacon.
- Hari ini 18 Februari: Kekerasan Antaretnis Dayak dan Madura Pecah. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretnis-dayak-dan-madura-pecah>. diakses 20 Maret 2018.
- Horton, Paul B. & Hunt, Chester. L. 1984. *Sosiologi, Jilid II edisi keenam*. Jakarta: Erlangga
- Indrapangastuti, Dewi. 2014. *Praktek Dan Problematik Pendidikan Multikultural Di Smk. Jurnal pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/26> <http://dx.doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2614>
- Kompleksitas Konflik Lampung. <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/04/08580419/Kompleksitas.Konflik.Lampung>. Diakses Februari 2018.
- Kusumohamidjojo, B. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Lerner, Richard M. 2004. *Hand Book of Adolescent Psychology (second edition), Jari erik Nurmi, Sosial ization And Self Development, Chapter 4, New York- John Willey & Sons Inc.*
- Lorens, Bagus. 1996. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marcia, J. E (et.al). 1993. *Ego Identity. A Hand Book for Psychological Research*. New York: Springer Verlag.
- Mujani, Syaiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-*

- Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Myers, David G. (1996). *Sosial Psycology*. New York: The MC Graw-Hill Companies Inc.
- Noel, Jana. 2000. *Multikultural education*. Connecticut: The McGraw-Hill Companies.
- Peraturan Kepala Badan Busat Statistik No 37 Tahun 2010. Badan Pusat Statistik.
- Poerwodarminta. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salehuddin, Ahmad. 2013. *Dilema Asrama daerah dalam membentuk kesadaran multicultural*, laporan penelitian individual Dosen, UIN Sunan Kalijaga.
- Sarwono. 2007. *Psikologi Prasangka Orang Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Toleransi Masyarakat Sudah "Lampu Kuning, Rabu, 27 Juni 2007 06:54 " http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=117/hl=id/Toleransi_Masyarakat_Sudah_Lampu_Kuning. Diakses tanggal 15 Agustus 2016.
- Wibowo, A. M, dkk. 2015. *Pendidikan Multikultural di Pulau Dewata, Sebuah Bunga Rampai Tentang Pendidikan Multikultural pada SMA di Provinsi Bali*. Yogyakarta: CV Arti Bumi Intaran.
- Wiratmadinata. 2014. *Akar Konflik Internal Aceh*. https://www.kompasiana.com/wiratmadinata/akar-konflik-internal-aceh_54f7c316a33311be208b48c5. Diakses Januari 2018.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.